



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pattimura Nomor 1 Telepon 314246 Fax 314246  
Website: [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id), Email: [setda.maluku09@gmail.com](mailto:setda.maluku09@gmail.com)

**KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU**  
**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG  
SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI  
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN SURAT  
PERTANGGUNGJAWABAN DALAM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2024**

**GUBERNUR MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Bab I Huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu Menunjuk/menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dalam Lingkup Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban Dalam Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
16. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 325;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Keputusan Gubernur Maluku tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar

dan Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban dalam Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, dengan contoh tanda-tangan dan paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Lingkup Perangkat Daerah (PD) di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 Januari 2024

an. GUBERNUR MALUKU  
SEKRETARIS DAERAH,



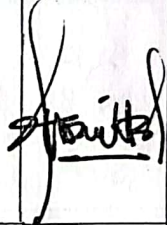



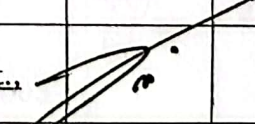
Ir. SADALI IE, M.Si, IPU  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19680828 199403 1 010



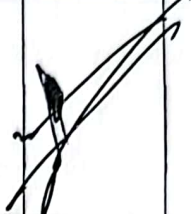

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth :

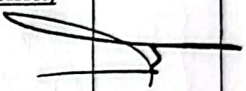









1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta;

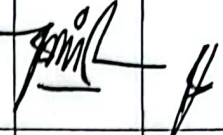





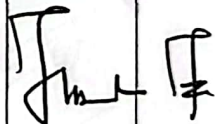

7. Inspektur Provinsi Maluku di Ambon;
8. Para Bupati/Walikota Se-Maluku;
9. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ambon di Ambon;
10. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
11. Kepala Kantor Wilayah XXIX Ditjen Anggaran Ambon di Ambon;
12. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Maluku di Ambon;
13. Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di Ambon;
14. Direktur Utama PT. Bank Maluku Maluku di Ambon;
15. Bendahara Pengeluaran di Ambon;
16. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU  
 NOMOR 7 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA  
 BARANG SEBAGAI PEJABAT YANG DIBERI  
 WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT  
 PERINTAH MEMBAYAR DAN MENGESAHKAN  
 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DALAM  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH  
 DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN  
 2024







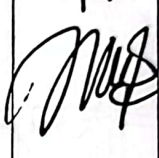









| No | Satuan Kerja/Unit Anggaran                           | Nama Pengguna Anggaran/Barang  | Tanda Tangan  | Paraf |
|----|--|--|---|-------|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5     |
| 1. | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                | <u>Ir. Sadali Ie, M.Si</u><br>Pembina Utama Madya<br>(IV/d)<br>NIP. 19680828 199403 1<br>010           |   |       |
| 2. | Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Maluku          | <u>Ir. Sadali Ie, M.Si</u><br>Pembina Utama Madya<br>(IV/d)<br>NIP. 19680828 199403 1<br>010           |   |       |
| 3. | Sekretariat DPRD Provinsi Maluku                     | <u>Drs. Bodewin M Wattimena, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda<br>(IV/c)<br>NIP. 19750504 199311 1<br>002 |  | E     |
| 4. | Dinas Pertanian Provinsi Maluku                      | <u>Ilham Tauda, S.P., M.Si</u><br>Pembina Utama Muda<br>(IV/c)<br>NIP. 19741225 199803 1<br>005        |  | ✓     |
| 5. | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku         | <u>Dr. Ir. Erawan Asikin, M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19690503 199503 1<br>003            |  | ✓     |
| 6. | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku | <u>Dr. Abdul Haris, S.Pi., M.Si</u><br>Pembina Utama Muda<br>(IV/c)<br>NIP. 19680215 199403 1<br>010   |  | ✓     |
| 7. | Dinas Kehutanan Provinsi Maluku                      | <u>Haikal Baadila, S.Hut., M.Si</u>  |  | 4.    |















|    |  |   |   |   |
|----|--|---|---|---|
|    |  | Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19730822 199903 1<br>009   |   |   |
| 8. | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan Provinsi<br>Maluku            | <u>Yahya Kotta, S.Pt, M.Si</u><br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19670527 199003 1<br>004                        |  |  |
| 9. | Dinas Koperasi, Usaha Mikro<br>Kecil dan Menengah Provinsi<br>Maluku | <u>Drs. Mohammad Nasir</u><br><u>Kilkoda</u><br>Pembina Utama Muda<br>(IV/c)<br>NIP. 19640324 198603 1<br>019 |  |  |

| No  | Satuan Kerja/Unit<br>Anggaran                                 | Nama Pengguna<br>Anggaran/Barang  | Tanda<br>Tangan   | Paraf   |
|-----|---|---|---|---|
| 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 10. | Dinas Tenaga Kerja dan<br>Trasmigrasi Provinsi<br>Maluku      | <u>Muhamad Rizal Latuconsina,</u><br><u>S.H., M.Si</u><br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19711104 199603 1 004       |    |    |
| 11. | Dinas Kesehatan Provinsi<br>Maluku                            | <u>Dr. sc.agr.drh Faradilla,</u><br><u>Attamimi, MTAPSc</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19740805 200604 2 028 |  |  |
| 12. | Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan Daerah Provinsi<br>Maluku | <u>Elvi Yana Tikupasang, S.K.M.,</u><br><u>M.Kes</u><br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19710111 199501 2 001         |  |  |
| 13. | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika Provinsi<br>Maluku        | <u>Drs. Melkias M. Lohy, M.T</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19670511 198810 1 001                       |  |  |
| 14. | Dinas Sosial Provinsi<br>Maluku                               | <u>Abdul Jalil Rumasukun, S.E.,</u><br><u>M.Si</u><br>Pembina Tk.I (IV/b)<br>NIP. 19670913 199202 1 003           |  |  |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
| 15. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku                | <u>Ir. Ismail Usemahu, MT</u><br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19650413 199303 1 009             |    |  |
| 16. | Dinas Perhubungan Provinsi Maluku                                      | <u>Dr. Muhammad Malawat, ST, MT</u><br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19721029 199803 1 002       |    |  |
| 17. | Dinas Pariwisata Provinsi Maluku                                       | <u>Dr. Achmad Jais Ely, S.T., M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19750603 200212 1 001     |    |  |
| 18. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku                 | <u>Syarif Hidayat, SE, M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19660921 199603 1 003                 |    |  |
| 19. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku | <u>Dr. Ir. Syuryadi Sabirin, M.Si</u><br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19650204 199103 1 013     |   |  |
| 20. | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku                                 | <u>Drs. Roy Corneles Siauta, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19660708 199803 1 003      |  |  |
| 21. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku                        | <u>Dr. Ir. Insum Sangadji, M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19610704 199203 2 001             |  |  |
| 22. | Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku                              | <u>Sandi Alexsander Wattimena, ST, MT.</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19680308 199603 1 004 |  |  |

| No | Satuan Kerja/Unit Anggaran | Nama Pengguna Anggaran/Barang | Tanda Tangan | Paraf |
|----|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------|
| 1  | 2                          | 3                             | 4            | 5     |

|     |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|
| 23. | Dinas Ketahanan Pangan<br>Provinsi Maluku                                   | <u>Dr. Achmad Jais Ely, S.T.,</u><br><u>M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19750603 200212 1 001 |    |    |
| 24. | Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Provinsi<br>Maluku               | <u>Abdulrahim Maruapey, S.H.,</u><br><u>M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19710716 199803 1 010      |    |    |
| 25. | Dinas Perumahan dan<br>Kawasan Permukiman<br>Provinsi Maluku                | <u>Lasinta Ladisa., S.T M.Eng</u><br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 19720923 200604 1 003                           |    |    |
| 26. | Dinas Pemberdayaan<br>Perempuan dan<br>Perlindungan Anak<br>Provinsi Maluku | <u>Ina Wati Tahir , S.E, M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19780924 200112 2 002                     |    |    |
| 27. | Badan Perencanaan<br>Pembangunan Daerah<br>Provinsi Maluku                  | <u>DR. Anton. A. Lailossa,</u><br><u>ST,M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19700208 199803 1 010 |  |  |
| 28. | Badan Pengelola Keuangan<br>dan Aset Daerah Provinsi<br>Maluku              | <u>Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si</u><br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19640128 199311 1 001            |  |  |
| 29. | Badan Pendapatan Daerah<br>Provinsi Maluku                                  | <u>Drs. Zulkifli Anwar, Ak, M.Si</u><br>Pembina Utama Madya (IV/d)<br>NIP. 19640128 199311 1 001            |  |  |
| 30. | Badan Pengembangan<br>Sumber Daya Manusia<br>Provinsi Maluku                | <u>Drs. Hadi, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19690314 198902 1 002                           |  |  |

|     |   |  |   |   |
|-----|---|--|---|---|
| 31. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku            | <u>Dra. Halimah Tussaadiyah Soamole, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19650813 199209 2 001 |    |    |
| 32. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku   | <u>Daniel Indey, S.Sos, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19681210 198902 1 002              |    |    |
| 33. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku | <u>Syarif Hidayat, SE, M.Si</u><br>Pembina Tk. I (IV/b)<br>NIP. 19660921 199603 1 003                    |    |    |
| 34. | Badan Penghubung Provinsi Maluku                    | <u>Saiful Indra Patta, S.STP, M.Si</u><br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 19810518 200112 1 005                   |    |    |
| 35. | Badan Pengelola Perbatasan Negara Provinsi Maluku   | <u>Affandy Hasanusi S.STP, M.Si</u><br>Pembina Tk I (IV/b)<br>NIP. 19800103 199912 1 002                 |    |    |
| 36. | Inspektorat Provinsi Maluku                         | <u>Drs. Jasmono, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19741226 199412 1 003                     |  |  |
| 37. | Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Maluku          | <u>Drs. Titus F.L. Renwarin, M.Si</u><br>Pembina Utama Muda (IV/c)<br>NIP. 19710924 199101 1 003         |  |  |

an. GUBERNUR MALUKU  
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. SADALI IE, M.Si, IPU  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19680828 199403 1 010